

Inovasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kepatuhan Administrasi Kependudukan Masyarakat Desa Pematangrahim Provinsi Jambi

¹Maslaini, ²Madinatul Munawwarah, ³Arsan Isro, ⁴Zeni Sunarti

^{1,2,4}Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

³IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah

Email: ¹alananan0159@gmail.com, ²madinaalamsyah@gmail.com, ³arsanisro1996@gmail.com, ,
⁴zenisunarti@gmail.com,

Abstrak

Kepatuhan terhadap administrasi kependudukan di Desa Pematangrahim, Provinsi Jambi, menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan publik dan mendukung perencanaan pembangunan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran mahasiswa dalam meningkatkan kepatuhan administrasi kependudukan melalui program "Sosialisasi Ajak Masyarakat Tertib Administrasi" (SAMA TAAT). Program ini mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan administrasi kependudukan dan membantu mereka dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SAMA TAAT dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang tertib, serta mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan dengan pendekatan langsung dari mahasiswa. Dengan demikian, program ini berperan penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan administrasi kependudukan di desa dan mendukung keberlanjutan sistem administrasi yang lebih akurat dan efisien. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pihak terkait untuk terus memperkuat sosialisasi dan memperluas implementasi program serupa di desa-desa lain.

Kata Kunci: Kepatuhan Administrasi Kependudukan, Program SAMA TAAT, Sosialisasi, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Kepatuhan terhadap administrasi kependudukan menjadi salah satu tantangan penting dalam pengelolaan data kependudukan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi seperti desa-desa di Provinsi Jambi. Administrasi kependudukan, yang meliputi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya, memegang peranan vital dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan publik, hak-hak sipil, dan mendukung perencanaan pembangunan yang efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara memiliki hak untuk terdaftar dalam administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, di banyak daerah, termasuk Desa Pematangrahim di Provinsi Jambi, tingkat kepatuhan terhadap administrasi kependudukan masih rendah. Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat di desa ini seringkali menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi, baik karena keterbatasan informasi, jarak yang jauh dari pusat pelayanan, maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dokumen tersebut. Hal ini menyebabkan banyak warga desa tidak terdaftar dengan baik dalam administrasi kependudukan, yang pada gilirannya membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial dari pemerintah.

Berdasarkan teori perubahan sosial yang diajukan oleh Everett Rogers (1962) dalam model difusi inovasi, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi besar dalam memperkenalkan inovasi yang dapat mengatasi masalah ini. Inovasi dalam konteks ini dapat mencakup pemanfaatan teknologi, penyuluhan langsung, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan.

Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses administrasi kependudukan dapat mempercepat peningkatan kepatuhan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan untuk mendukung pembangunan daerah dan negara. Dengan memperbaiki data kependudukan, pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendistribusikan bantuan sosial dengan lebih efisien, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, kepatuhan administrasi kependudukan juga berkontribusi pada penguatan sistem keamanan dan ketertiban sosial, karena data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan oleh pihak berwenang.

Munculnya masalah penelitian ini terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan administrasi kependudukan di Desa Pematangrahim. Salah satu alasan utama adalah kurangnya informasi yang memadai tentang manfaat dokumen kependudukan dan kesulitan dalam mengakses layanan administrasi di daerah yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang mampu menjangkau masyarakat desa secara efektif dan efisien.

Alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan mencakup pengenalan teknologi informasi dalam proses administrasi, seperti layanan online untuk pendaftaran dokumen kependudukan, serta program penyuluhan yang melibatkan mahasiswa untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah memanfaatkan peran mahasiswa sebagai penggerak perubahan melalui pelatihan dan pendampingan di desa, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi inovasi yang diterapkan oleh mahasiswa dalam meningkatkan kepatuhan administrasi kependudukan masyarakat di Desa Pematangrahim, Provinsi Jambi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan administrasi kependudukan di desa-desa lain, serta menyusun model inovasi yang dapat diterapkan di berbagai daerah.

METODE PENELITIAN

Metode Program dukungan pelayanan pengelolaan kependudukan adalah Sosialisasi, pendekatan partisipatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang mengidentifikasi kebutuhan pembangunan suatu daerah atau desa dengan mengutamakan masyarakat. Mahasiswa melakukan penelitian lapangan langsung di wilayah tersebut. Hasil dari program pendampingan ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa dalam mendukung layanan pengelolaan kependudukan benar-benar dapat membantu masyarakat dalam mematuhi dokumen pengelolaan kependudukan. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 16 September sampai Tanggal 16 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu Pemerintah Desa Pematang Rahim dan Masyarakat setempat dalam memberikan pelayanan dalam kepatuhan Masyarakat dalam pengelolaan Administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanjung Jabung Timur melalui keterlibatan langsung sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat setempat. Pengelolaan kependudukan merupakan landasan seluruh pelayanan masyarakat sejak lahir hingga meninggal. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Masyarakat dalam pengelolaan data Administrasi kependudukan mendorong Masyarakat untuk senantiasa mengecek data yang sudah ada maupun data yang akan dibuat dan diperbaharui melalui program Mahasiswa SAMA TAAT (Sosialisasi Ajak Masyarakat Tertb Administrasi). Dengan Program tersebut dapat membantu Masyarakat dalam membuat Administrasi kependudukan dengan memperkuat Sosialisasi dan pendekatan dalam membuat

Adminduk, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dari program yang dijalankan Mahasiswa dalam pengabdian Masyarakat. Dalam Program SAMA TAAT ini Masyarakat bisa bertanya langsung terkait kendala yang ada maupun syarat dan ketentuan dalam pembuatan Administrasi kependudukan baik perubahan data maupun data baru dengan pelayanan yang lebih cepat dan tepat dengan mengacu pada dasar perubahan berdasarkan Undang-Undang Kependudukan

Masyarakat umum bisa mengurus Administrasi kependudukan melalui mahasiswa PPL dan tentunya bekerja sama pihak Pemerintahan Desa pematang Rahim, Program SAMA TAAT adalah Program yang mengajak masrakat untuk mengecek maupun membuat Administrasi kependudukan yang di sosialisasikan oleh Mahasiswa yang mana hal ini akan memudahkan masyarakat memperoleh impormasi dan dokumen Administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN

Pelayanan pengelolaan dalam meningkatkan kepatuhan Administrasi di Masyarakat, kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengelolaan kependudukan mencakup berbagai pelayanan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran, Akta kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta perkawinan bagi Non muslim dan dokumen lain yang berkaitan dengan status keimigrasian seseorang. Keberhasilan pengelolaan kependudukan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, karena pendokumentasian kependudukan merupakan syarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) dalam mencatat dan mendaftarkan Kewarganegaraan adalah instansi pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kependudukan dan pencatatan kependudukan pada tingkat kabupaten/kota. Tanggung jawabnya meliputi mengumpulkan data kependudukan melalui Masyarakat yang membuat dan melengkapi persyaratan kependudukan melalui Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah

Dokumen yang berhubungan dengan kependudukan seperti KTP, Akta kelahiran, Akta kematian, Akta perkawinan bagi non muslim, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan lain-lain. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan dan berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lokal terkait kebutuhan pengelolaan kependudukan. Pemerintah pusat mengatur data kependudukan secara hierarkis melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil kebijakan sudah ada. telah diterbitkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kependudukan Nasional (NIK) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu, salah satu wilayah Administratip yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mempunyai tantangan tersendiri dalam pengelolaan kependudukan. Kendala umum yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkpan dan kesamaan data Administrasi kependudukan pendokumentasian kependudukan, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Program SAMA TAAT merupakan salah satu upaya Mahasiswa dalam mensosialisasikan kepatuhan Masyarakat dalam melengkapi Administrasi kependudukan di Desa Pematang Rahim. Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang

pentingnya pengelolaan kependudukan, memberikan bantuan langsung, maupun mensosialisasi, pemberkas, pendekatan, menanyakan kendala yang di hadapi dan memfasilitasi akses pelayanan terhadap masyarakat dalam pengelolaan kelengkapan Administrasi kependudukan.

SAMA TAAT

SAMA TAAT (Sosialisasi Ajak Masyarakat Tertip Administrasi) merupakan salah satu program yang dilaksanakan Mahasiswa untuk mengoptimalkan pelayanan pengelolaan kependudukan di Desa Pematang Rahim. Dengan program ini, Masyarakat bisa mendapatkan pengurusan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, update status perkawinan, dan lain-lain. Melalui program mahasiswa SAMA TAAT, masyarakat dapat menerima lebih banyak informasi dan dukungan melalui pengelolaan kependudukan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan dalam pengelolaan Administrasi kependudukan, memberikan bantuan langsung dalam pendokumentasian, dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan kependudukan.

Kegiatan PPL ini tentu bekerjasama dan diawasi Pemerintah setempat. Melalui kegiatan sosialisasi kependudukan merupakan salah satu bagian tugas Mahasiswa PPL untuk membantu memperbaiki dan membuat Administrasi kependudukan masyarakat Desa Pematang Rahim. Pada saat pelaksanaan PPL, Asisten Pelayanan Pengelolaan Kependudukan ditugaskan di Desa Pematang Rahim. Dinas ini bertugas membantu warga dalam pengurusan dokumen kependudukan melalui Program SAMA TAAT. Mahasiswa akan membantu pelayanan warga yang datang ke Kantor Desa Pematang Rahim yang perlu mengurus dokumen-dokumen terkait kependudukan seperti: Pengajuan KTP yang hilang, Pengajuan cetak KTP rusak, Pengajuan Surat Nikah, Pengajuan Warisan, Pengajuan Cetak Kartu Keluarga Hilang, Pengubahan Data Biometrik Kartu Keluarga. Warga tersebut datang dengan membawa dokumen yang diperlukan, Mahasiswa akan membantu merekap dalam mengajukan permohonan Administrasi Kependudukan sesuai petunjuk dan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Ini akan menjadi dokumen yang lengkap. Tujuan kegiatan kemahasiswaan pada program ini adalah untuk memanfaatkan program SAMA TAAT (Sosialisasi Ajak Masyarakat Tertip Administrasi) Selama PPL dilakukan kegiatan pengelolaan kependudukan di Kantor Desa Pematang Rahim dan Sosialisasi pada acara-acara keramaian dan hajatan warga. Menurut Kepala Desa Pematang Rahim program yang dijalankan oleh mahasiswa ini dapat membantu pelayanan warga sehingga masyarakat lebih memahami bahwa betapa pentingnya kepatuhan warga terhadap Administrasi kependudukan sehingga dengan kelengkapan data warga pelayanan masyarakat pada segala urusan warga dapat berjalan dengan baik “Administrasi Lengkap pelayanan cepat”.



Photo dokumentasi kegiatan sosialisasi tertib Administrasi kependudukan Desa Pematang Rahim



Photo dokumentasi kegiatan sosialisasi tertib Administrasi kependudukan Desa Pematang Rahim



Sosialisai kepada para ketua RT terkait Administrasi kependudukan



Pelayan Administrasi kependudukan di kantor Desa Pematang Rahim

Data Penduduk Dan Permasalahan Administrasi Dikalanagan Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Pematang Rahim pada Semester Dua Tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki 1.873 Jiwa, Perempuan 1.780 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan 3.653 Jiwa, Untuk jumlah Kepala Keluarga laki-laki 951, Perempuan 178, Jumlah Kepala Keluarga laki-laki dan Perempuan 1.129. Desa Pematang Rahim merupakan desa No dua penduduk terbanyak dari enam desa satu Kelurahan di Kecamatan Mendahara Ulu, Desa Sei Beras dengan jumlah penduduk sedikit lebih banyak yakni berjumlah 3.760.

Dari sekian besar jumlah penduduk tersebut sudah tidak dimungkiri lagi ada permasalahan dan kendala terkait Administrasi kependudukan Masyarakat, Dari temuan yang ada dilapangan data di Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai di KTP, di Akta Lahir, di ijazah, maupun di surat nikah. Bahkan terkadang Masyarakat lalai sendiri dengan Administrasi kependudukan yang mana ketika Administrasi di perlukan baru di temukan data-data yang bermasalah seperti yang diuraikan diatas, Bahkan terkadang ada Masyarakat ketika anaknya mau masuk sekolah baru mau buat Akta lahir maupun perubahan elemen data kependudukan lainnya, dan parahnya lagi ketika mau menikah baru mau buat Akta lahir.

Dari hasil temuan permasalahan diatas ini bukan kelalaian dari pejabat pemerintah setempat akan tetapi kurangnya perhatian Masyarakat itu sendiri terhadap kepedulian untuk mengecek Administrasi, dari dokumentasi kependudukan yang sudah ada karna kurangnya SDM Masyarakat meskipun pemerintah sudah berupaya menyampaikan untuk mengecek kebenaran Administrasi kependudukan.

Kami berkomunikasi dengan perangkat Desa Pematang Rahim Kasi Pemerintahan bahwa bukan itu aja kendala yang membuat Masyarakat terkadang enggan untuk mengubah data kependudukan yang tidak palit, dikarenakan setiap ada perubahan elemen data atau perubahan harus disertakan dasar perubahan dan dilampirkan pada pormulir permohonan, baik itu pembuatan KK, Akta lahir dan lainnya sebagai dasar pembuktian, Contoh di Kartu Keluarga (KK) tertulis nama orang tua (Ayah) Abdul Wahab di ijazah dan akta lahir tertulis Abd Wahab, maka KK harus diubah berdasarkan ijazah dan Akta lahir dengan melampirkan fotocopy dasar perubahan dengan dibubuhi matrai dan ditandatangani pada pormulir perubahan data. Begitu juga dengan perubahan lainnya terkadang perubahan inilah yang tidak terpenuhi oleh Masyarakat untuk diajukan kedinas kependudukan dan catatan capil.

Melalu kegiatan Program SAMA TAAT (Sosialisasi Ajak Masyarakat Tertip Administrasi) Mahasiswa dapat mensosialisasikan, melayani Masyarakat baik secara umum dan pormal maupun pendektan langsung kelapangan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya data kependudukan yang benar dan palit, Sekaligus membantu untuk membuat data kependudukan, baik yang baru diusulkan maupun ada perubahan elemen data sebelumnya, Dengan sosialisasi maupun turun langsung kelapangan kesadaran dan kemauan Masyarakat untuk taat terhadap pentingnya kepatuhan Administarsi yang palid dan lengkap dapat terwujud di Desa Pematang Rahim dengan mengoptimalkan kesempatan dan metode yang di jalankan oleh Masiswa PPL

Optimalisasi

Optimasi merupakan suatu cara atau metodologi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih optimal berdasarkan peraturan Undang-Undang yang sudah ditentukan. Optimasi berasal dari kata “optimal” yang berarti “terbaik”. Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil dan keuntungan yang ideal atau lebih baik (achievableefisiensi nilai) tanpa mengurangi kualitas pekerjaan, atau suatu bentuk optimalisasi yang sudah ada. Optimasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja berdasarkan kemaslahatan bersama. Optimasi berasal dari kata “optimum” yang berarti “terbaik” atau “terbaik”. Optimasi berarti menjadikan yang terbaik, namun optimalisasi juga merupakan proses mengoptimalkan sesuatu, menjadikan sesuatu lebih baik atau terbaik (Mohammad Nurul Huda, 2018).

Pelayanan

Secara umum pelayanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhannya melalui pelayanan. Jasa adalah segala perbuatan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada prinsipnya tidak terjadi dan tidak menimbulkan hak milik. Pelayanan pengelolaan kependudukan adalah berbagai kegiatan yang dirancang untuk mengelola, mendukung, mensosialisasikan dan memfasilitasi operasi dalam lembaga pemerintah melalui pengabdian Mahasiswa terhadap Masyarakat yang berdasarkan ketentuan dan peraturan Kementrian maupun Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat mencakup pengolahan data, pengarsipan dokumen, serta berbagai permasalahan sosial terkait pengelolaan Administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan

Pengelolaan kependudukan mengacu pada serangkaian kegiatan penataan dan pengendalian dalam publikasi dokumen dan data kependudukan. Pengertian pengelolaan kependudukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Kependudukan meliputi serangkaian kegiatan penataan dan pengurusan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan pengelolaan kependudukan. informasi. dan menggunakan hasilnya untuk pengembangan pelayanan publik dan bidang lainnya. Pengelolaan kependudukan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengelolaan kependudukan mencakup berbagai pelayanan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran, Akta kematian, Kartu Identitas Anak (KIA) dan dokumen lain yang berkaitan dengan status keimigrasian seseorang.

KESIMPULAN

Administrasi kependudukan merupakan dasar utama dalam setiap kebutuhan pengurusan dimanapun kita berada, sehingga masyarakat di harapkan kepatuhannya untuk tertib Administrasi agar pelayanan dalam segala hal dapat dipermudah dan pengendalian populasi menempati posisi yang sangat penting. Kehadiran Mahasiswa ini akan menciptakan kondisi yang baik untuk menjalankan aktivitas berbasis identitas kependudukan. Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan peranan penting dalam penerbitan Administrasi kependudukan berjalan efektif sesuai prosedur SOP dan standar pelayanan mulai dari etika pelayanan publik, ketepatan dan kedisiplinan pelayanan, kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi. Pendataan kependudukan masih terus dimutakhirkan setiap bulannya, dan memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai status kemiskinan penduduk, jumlah penduduk yang masuk, jumlah penduduk yang keluar negeri, jumlah kematian, dan jumlah kelahiran. Untuk menjamin pelayanan tepat waktu, Desa Pematang Rahim memiliki berbagai kompleks permasalahan terkait Administrasi kependudukan, Dengan bantuan program Mahasiswa SAMA TAAT yang memadai mulai dari sosialisasi, pendekatan Masyarakat, dalam layanan terhadap Masyarakat. Hal ini memudahkan penulis sebagai penyedia jasa dalam melakukan operasional pelayanan. Penulis dapat berpesan agar masyarakat lebih peka terhadap pengelolaan sumber daya manusia. seperti yang penulis sampaikan di awal, intinya adalah pengendalian populasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sangat disayangkan masih banyak warga sekitar yang menganggap pengendalian penduduk tidak diperlukan dan tidak terlalu memperhatikan pengendalian terhadap Administrasi kependudukan. Dan dalam Program yang dijalankan diatas dapat menyadarkan Masyarakat bahwa begitu pentingnya kepatuhan warga dalam tertib Administrasi kependudukan sehingga pelayanan publik berjalan dengan mudah, cepat, dan Akuntabel. Dengan Program yang dijalankan Mahasiswa tersebut diatas amat membantu keberlanjutan terhadap kepatuhan Masyarakat untuk patuh terhadap Administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, F. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Duhita, A. S. (2018). Inovasi Produk E-Lampid dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 11. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1430c8e0b0full.pdf>
- Apriliani, K. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. *Widya Accarya*, 11(1), 01–09. <https://doi.org/10.46650/wa.11.1.826.01-09>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Perspektif*, 8(2), 77–83. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597>
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Cahyadi, R. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569-586.
- Cendana, G. A., & Oktariyanda, T. A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. *Publika*, 1089-1100.
- Misdwiyanti Masuroh, H. (2018). Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web di Desa Ngrupit. *Jurnal of Misdwiyanti Masuroh*, 5–24. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/668>